



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIS SUMIATI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 659555

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112.5 m2/45 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/200 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/50 m2 di SUMEDANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 1583 m2 di SUMEDANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 3.500.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 61.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.335.200.000

III. HUTANG

Rp. 295.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.040.200.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.